

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP
KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Oleh:

CHAIRANI ASMI

NIM. 52154085

Program Studi

Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUMATERA UTARA

2019

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP
KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

CHAIRANI ASMI

NIM. 52154085

Program Studi
Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairani Asmi

Nim : 52154085

Tempat / Tgl Lahir : Sambirejo Timur, 24 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Rahayu Dsn. 8 Cempaka Sambirejo Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 21 Januari 2020

Yang membuat pernyataan

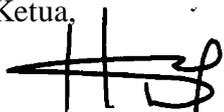

Chairani Asmi

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN” an. Chairani Asmi, NIM 52154085 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

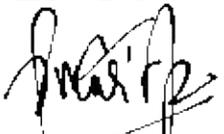
Medan, 21 Januari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



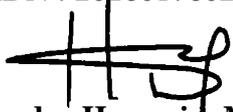
Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN : 2010057302



Dr. Marliyah, M.Ag

NIDN : 2026017602



Hendra Harmain, M.Pd.

NIDN : 2010057302



Rahmi Syahriza, S.Th, MA

NIDN : 2003018501

Sekretaris,



Kusmlawaty, SE, M.Ak

NIDN : 2014068001

Anggota



Rahmat Daim Harahap, M.Ak

NIDN : 0126099001



Drs. Sugianto MA

NIDN : 2007066701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andri Soemitra, MA

NIDN : 2007057602

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**Pengaruh Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan dan Pelatihan,
terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan pada
Pemerintah Kota Medan**

Oleh :

Chairani Asmi

Nim. 52154085

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 20 November 2019

Pembimbing I



Dr. Marliyah, MA

NIP. 197601262003122003

Pembimbing II

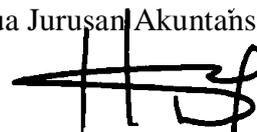


Rahmat Daim Hrp, M.Ak

NIP. 199009262018031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, M.Pd

NIP.197305101998031003

ABSTRAK

Chairani Asmi (2019), Pengaruh Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan dan pelatihan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada SKPD Kota Medan. Dengan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing Skripsi II Bapak Rahmat Daim Hrp, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan dan pelatihan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada SKPD Kota Medan, serta untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh secara dominan diantara tiga variabel tersebut. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan dan pelatihan. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kota Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 124 sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh/sensus. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang di peroleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor pada SKPD Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman SAP berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Sedangkan latar belakang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Kata Kunci : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan, Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN”**. Shalawat dan salam juga tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk disetujui sebagai langkah awal penyusunan skripsi yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih karena telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Hendra Harmain, SE, M.pd** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu **Kusmilawaty, SE, M.Ak**. Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam penyusunan jadwal kuliah, sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dan sekaligus menulis skripsi ini.
4. Ibu **Nurlaila SE, MA** Selaku Penasehat Akademik Saya yang telah sabar membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Marliyah, MA** sebagai pembimbing skripsi I dan Bapak **Rahmat Daim Hrp, M.Ak** selaku pembimbing skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Orang Tua Tercinta Ayahanda **Lasdiono** dan Ibunda **Asnah** yang selalu

mendoakan, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis

8. **Ihwan Fauzi Siagian, SM** yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis. dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak **Desy Lilis Anwar Siagian, Amd** abangda **Anda Amalianur, ST** Ibunda **Delminar Simanjuntak** dan Bapak **Nanang Akbar Siagian** yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu bertanya kapan selesai kuliah.
10. Seluruh keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam perkuliahan penulis terkhusus kepada kedua nenek penulis, nenek **Mariyem** dan nenek **Kisem**, ibuk penulis buk **Santi** dan buk **Suharni**, uwak **Sarifah Aini** tak lupa juga bang **Hari** dan kak **Sari**.
11. Sahabat tercinta **Sholeha** temen dari smk yang selalu mensupport penulis, **Inge Agnesia S.Akun** dan terakhir **Nadra Aulia Srg, SE** yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Adik tersayang **Aisyah Agustina, Dedek Nurmayani, Muhammad Karel, Feby Angel Auralia, Salsa Dela Safira** yang selalu bertanya kapan lulus dan selalu menyemangati penulis.
13. Seluruh teman-teman Akuntansi Syariah Kelas B terkhusus untuk **Gold Digger (Windy Pratiwi S.Akun, Siti Adi Afni Syafitri S.Akun, Ana Marianta S.Akun dan Indah Permata Sari Nst S.Akun)** yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini dan juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Medan, November 2019



Chairani Asmi

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Laporan Keuangan	9
a. Pengertian Laporan Keuangan	9
b. Dasar Hukum Laporan Keuangan	10
c. Asumsi Dasar Laporan Keuangan.....	11
d. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.....	11
e. Komponen Laporan Keuangan	13
f. Laporan Keuangan dalam Perspektif Islam	14
g. Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan	16
h. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.....	17
i. Indikator variabel ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	21

2. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	21
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	21
b. Sejarah Standar Akuntansi Pemerintahan.....	22
c. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	23
d. Indikator Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan.....	24
3. Latar Belakang Pendidikan	25
a. Pengertian pendidikan	25
b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan	25
c. Indikator Variabel Latar belakang pendidikan.....	26
4. Pelatihan	27
a. Pengertian Pelatihan	27
b. Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan	28
c. Tahap-tahap Pendidikan dan pelatihan.....	30
d. Metode Pelaksanaan Program Pendidikan dan pelatihan	32
e. Pendidikan dan Pelatihan dalam Perspektif Islam	34
f. Indikator variabel Pelatihan	35
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pemikiran.....	42
D. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Populasi Dan Sampel	45
D. Jenis/Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Definisi Opeasional dan Indikator Variabel	49
F. Analisis Deskriptif.....	53
G. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data	53
H. Pengujian Asumsi Klasik.....	54
I. Analisis Regresi Linier Berganda	55

J. Pengujian Hipotesis	56
BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....	58
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan	58
B. Deskripsi Data Penelitian	59
C. Hasil Analisis Uji Kualitas Data	60
D. Analisis Deskriptif Variabel	63
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	68
F. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	73
G. Uji Hipotesis	75
H. Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Keterbatasan.....	82
C. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	39
3.1 Waktu Penelitian	45
3.2 Populasi Penelitian SKPD Pemerintah Kota Medan.....	46
3.3 Definisi Operasional dan Indikator Variabel	50
4.1 Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	60
4.2 Hasil uji validitas	61
4.3 Hasil Uji Reabilitas	62
4.4 Frekuensi Responden Terhadap Variabel Pemahaman SAP	63
4.5 Frekuensi Responden Terhadap Variabel Latar Belakang pendidikan.....	64
4.6 Frekuensi responden terhadap variabel pelatihan	66
4.7 Frekuensi responden terhadap variabel ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	67
4.8 Hasil Uji Normalitas.....	70
4.9 Hasil uji Multikolinearitas	72
4.10 Hasil uji Regresi Linier Berganda.....	74
4.11 Hasil Uji Simultan (Uji-F)	76
4.12 Hasil Uji Parsial (Uji-T)	77
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
4.1 Grafik Normal P-P Plot.....	69
4.2 Histogram normal P-P Plot.....	69
4.3 Sccater Plot Uji Heterokesdatisitas	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuisioner Penelitian
2. Data Kuisioner
3. Hasil Olahan SPSS
4. Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Ross Melly bahwa secara umum “tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial serta menampilkan akuntabilitas dan berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi”.¹

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam alokasi sumber daya ekonomi harus diperuntukkan untuk kepentingan publik dan proses alokasi sumber daya perlu dikontrol atau diawasi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengontrol kebijakan pemerintah adalah teknik akuntansi. “Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku” Suwardjono.² Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan.

Sri ayu menegaskan “akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai *good governance*, sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan, yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan

¹ Ross, Melly. 2013. *Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Negeri Medan. Hal-4

² Suwardjono. 2005. teori Akuntansi .. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Hal-159

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik”.³

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Warren menegaskan “*improving budgeting* di Negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik yang sukar dihindari”.⁴ Kerentanan tersebut menuntut pemahaman yang memadai dalam akuntansi keuangan daerah, termasuk penguasaan tentang teknik-teknik akuntansi keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) adalah: Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki 4 unsur yakni: a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu; b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; c) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

³ Aswadi, Sri Ayu Wulandari. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang). Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. Hal-18

⁴ Warren, Carl. S, James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Hal-55

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah; dan d) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintah daerah tersebut, harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menarik untuk dikaji karena banyak penyimpangan ditemukan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kota Medan yang sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan opini WDP, dan salah satu penyebabnya adalah belum tepatnya waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M. Si., M. H. menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, Rabu, 27 Maret 2019. Laporan Keuangan yang itu diterima secara resmi oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Dra. V.M. Ambar Wahyuni di kantor BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.⁵

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2018 terjadi karena SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan terlambat menyampaikan laporan keuangan pemerintah ke PPKD sehingga pengkonsolidasian ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi terlambat. Walikota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si menyatakan akan segera menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut, dan kedepannya Pemko Medan akan terus melakukan konsultasi dengan BPK RI Perwakilan

⁵ <https://pemkomedan.go.id/artikel-18680-wali-kota-serahkan-laporan-keuangan-pada-bpk-perwakilan-sumut-.html> diakses pada 18 September 2019 pukul 09.11 Wib

Sumatera Utara. Ia juga berjanji akan menjatuhkan sanksi bagi para pimpinan SKPD yang tidak menjalankan aturan dengan baik.

Saat ini banyak SKPD yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban kepada PPKD dengan alasan pengguna anggaran belum menandatangani, bahkan banyak SKPD menimpakan semua tugas penatausahaan keuangan kepada bendahara mulai dari pembayaran, menyusun laporan pertanggungjawaban, melakukan verifikasi, analisis atas laporan pertanggungjawaban pada SKPD yang seharusnya adalah tugas PPK selaku pelaksana fungsi akuntansi. Hal ini terjadi karena PPK-SKPD tidak memahami tugasnya dan juga pengguna anggaran tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana mekanisme pengelola keuangan SKPD.

Agar kinerja perangkat SKPD dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman dari perangkat yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diterapkan. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan keuangan daerah tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan,⁶ “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Namun Roesyanto menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan”.⁷ Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor

⁶ Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Hal-2

⁷ Roesyanto, Indah A., 2007. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan hal-7

pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud dilihat dari dua sisi, yaitu latar belakang pendidikan dan strata pendidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Efendi tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah seperti kota atau kabupaten di Indonesia, menyimpulkan bahwa : “penempatan PNS sering tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan”.⁸ Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan, “tingkat pendidikan birokrasi negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat memengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil keputusan”.⁹ Hal ini tentu sangat memprihatinkan dimana seharusnya dalam penyusunan Laporan Keuangan dibutuhkan sumber daya yang benar-benar berkualitas.

Selain itu perlu juga diperhatikan faktor pelatihan dalam mendukung perangkat SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pelatihan. Hal tersebut senada dengan pendapat Rajana Putri bahwa “para pegawai dapat berkembang lebih pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli” selain itu Rajana Putri juga menyatakan bahwa “kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need) bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu,

⁸ Effendi, Sofyan, 2007. *Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Makalah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hal 21

⁹ Menteri Pendayagunaan Aparatur (Menpan), 2005. “Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good and Clean Government”, *Makalah*, Sespati Polri, Bandung.

seperti penurunan prestasi”.¹⁰ Begitu juga dengan Youhanes yang menyatakan bahwa “pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat”.¹¹ Namun Menpan menyatakan “pendidikan dan pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan”. Akibatnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman terhadap SAP, Latar belakang pendidikan dan pelatihan, terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan dan Pelatihan, terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih rendahnya kemampuan pemahaman SKPD pemerintah Kota Medan dalam menguasai dan menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Masih lambatnya SKPD pemerintah kota medan dalam menyusun laporan keuangan.
3. Masih Terbatasnya SKPD Pemerintah Kota Medan yang memiliki kualifikasi terkait latar belakang pendidikan di bidang keuangan.
4. Masih Terbatasnya SKPD Pemerintah Kota Medan yang memiliki kualifikasi terkait pelatihan di bidang keuangan.

¹⁰ Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009. Hal 18-20

¹¹ Enho, Yohanes, 2008. “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Lapotan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan

¹² Menteri Pendayagunaan Aparatur (Menpan), 2005. “Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good and Clean Government”, *Makalah*, Sespati Polri, Bandung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa pertimbangan lainnya, maka penulis melakukan beberapa batasan atas masalah yang akan diteliti, yaitu antara lain :

1. Penelitian ini dibatasi oleh aspek Akuntansi Sektor Publik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD yaitu : pemahaman terhadap SAP, latar belakang pendidikan, serta pelatihan yang telah dilakukan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman SAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?
2. Apakah Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?
3. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?
4. Apakah pemahaman terhadap SAP, Latar belakang pendidikan dan pelatihan, berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Medan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Latar belakang pendidikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, latar belakang pendidikan dan pelatihan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan menambah informasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Ada beberapa definisi dari laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintahan. Definisi laporan keuangan yang dikemukakan oleh Mahmudi sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberi informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuat keputusan”.¹

Definisi laporan keuangan menurut Bastian yaitu:

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”²

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.³

Menurut Martani “Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah yang diambil perusahaan sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi”.⁴

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai laporan keuangan menurut Mahmudi, Bastian, PP No. 71 Tahun 2010 dan Martani, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi

¹ Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Hal-276

² Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta

³ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

⁴ Martani, Dwi *et. al.* *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. 2014. Hal-174

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi pada periode tertentu yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan dalam Pernyataan No.1 SAP, “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna”. Yang dimaksud dengan pengguna pada pengertian diatas adalah masyarakat, legislatif, lembaga, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.⁵

b. Dasar Hukum Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Konseptual SAP, pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara pasal 23 ayat 1:
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”⁶
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara⁷
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara⁸
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.⁹
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.¹⁰
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.¹¹
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.¹²

⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara pasal 23 ayat 1

⁷ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Kemudian dijelaskan juga dalam Kerangka Konseptual SAP mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan (Kerangka Konseptual SAP,). Asumsi dasar tersebut, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).¹³

1) Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

2) Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.

3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

d. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Peranan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Konseptual SAP, yaitu:¹⁴

- 1) Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk menilai kondisi keuangan.

¹³ Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta. Hal-9

¹⁴ Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta. Hal-5

- 3) Untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.
- 4) Untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain peranan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat juga tujuan laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Konseptual SAP, yaitu:¹⁵

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

¹⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta. Hal-7

e. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan sebagaimana yang terdapat pada Pernyataan No.1 SAP,yaitu: ¹⁶

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian

¹⁶ Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta. Hal-7

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

f. Laporan Keuangan dalam Perspektif Islam

Konsep laporan keuangan menurut Surah Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surah Al-Baqarah : 282 memiliki pesan praktis suatu kegiatan transaksi. Paling tidak ada beberapa syarat yang diungkapkan dalam ayat ini mengenai keabsahan suatu transaksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang haruslah tertulis dan berdokumen.
- 2) Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang yang berhutang.
- 3) Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan kebenaran dan menjaga kejujuran.
- 4) Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua pihak yang menyaksikan proses transaksi.
- 5) Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi.

Setelah kita mempelajari konsep dari penyusunan laporan keuangan dari menelaah surah Al-Baqarah ayat 282, maka kita bisa melihat keduanya memiliki substansi yang sama. penyusunan laporan keuangan adalah menyusun transaksi-transaksi ekonomi sehingga menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi persyaratan, sebuah langkah atau proses yang dilakukan untuk mengarahkan perusahaan agar dapat menghindarkan organisasi atau perusahaan dari adanya kekeliruan atau tindakan kecurangan.

Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi. Dengan demikian, keduanya memiliki substansi yang sama yaitu sama-sama menyusun strategi untuk mengarahkan perusahaan agar terhindar dari kekeliruan dan kecurangan.

g. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor) dan peraturan yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)¹⁷. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk

¹⁷ Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1, hal 15

¹⁸ *Ibid* hal-6

menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD penyampaian tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum.

Ketepatan waktu merupakan salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan SKPD dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

h. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK.¹⁹ Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada yang tidak tepat waktu. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi informasi dari kegunaannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan antara lain:

1) Pemahaman SAP

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan,²⁰ “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Namun Roesyanto menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 mengenai

¹⁹ Sella Rachmawi, Rini, Yessi Fitri, 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia* Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) hal-48

²⁰ Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Hal-2

Standar Akuntansi Pemerintahan²¹. Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

2) Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.²² Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya. Akan lebih baik jika para pegawai yang menangani pembuatan laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

SKPD yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan SKPD. Kegagalan SKPD dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 17 ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.²³

Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Akhir akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam

²¹ Roesyanto, Indah A., 2007. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan", *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan hal-7

²² Darno, 2013. *Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna* (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah kerja KPPN Malang). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

²³ Warisno, 2009, *Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

penyusunan laporan keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan penerimaan pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan.²⁴

Menurut Ihsanti bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman terhadap SAP berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.²⁵

3) Kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah

Pemerintah masih sangat mengandalkan pada dana berimbang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan yang telah dikabarkan oleh BPK bahwa 90% pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota masih bergantung pada dana perimbangan ini. Pemerintah daerah mengalokasikan dana perimbangan ini untuk tujuan operasional dan investasi. Cohen dan Laventis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk untuk melaporkan keuangan daerah secara tepat waktu.²⁶ Hal ini dikarenakan terdapat sanksi akan keterlambatan pelaporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yaitu berupa penundaan pencairan dana tahun anggaran berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diberikan

²⁴ Hersona, H. Sonny, Rismayadi, B., Mariah, Euis Siti. 2012. *Analisis pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang*. Jurnal Manajemen. Vol. 09 No.3: 717-729

²⁵ Ihsanti, Emilda, 2014, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Artikel*, Universitas Negeri Padang.

²⁶ Cohen, S., dan S. Leventis. 2012. *Effects Of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay*. *Accounting Forum*, 37 (2013) hal-53

pemerintah maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam melaporkan LKPD.

4) Pelatihan

Menurut Zunarli, pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relative pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan diadakan pelatihan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan prilaku yang ditekankan dalam program program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari hari para karyawan.²⁷

Penguasaan terhadap beban kerja yang dimiliki akan meningkatkan produktifitas kerja seseorang. Dengan produktifitas kerja yang tinggi, penyelesaian pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat tercapai. Menurut Soekidjo, pengembangan SDM mencakup baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman lingkungan keseluruhan maupun pelatihan yang menambah keterampilan dalam melaksanakan tugas yang spesifik.²⁸

5) Lokasi Daerah

Menurut Nurhadi, minimnya pembangunan pada suatu daerah akan berdampak pada rendahnya aksesibilitas daerah tersebut. Ketika suatu daerah memiliki aksesibilitas yang rendah sebagai akibatnya daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh faktor produksi, akses transportasi dan telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan berupa universitas-universitas yang mempunyai reputasi salah satunya dalam menghasilkan tenaga akuntan yang cakap dalam pengelolaan keuangan. Pemerataan pembangunan daerah yang belum sempurna tersebut juga tentu menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaporan keuangan daerah terutama

²⁷ Zurnali, Cut. 2004. *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia, Tbk.* Tesis Bandung: Universitas Padjajaran.

²⁸ Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

dari daerah-daerah terpencil dimana mereka kesulitan mengakses informasi ataupun karena faktor minimnya sumber daya manusia yang ada.²⁹

i. Indikator Variabel Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun karakteristik Ketepatan Waktu Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas meliputi: Dapat dipahami, Relevan, Keandalan dan dapat diperbandingkan Dalam penelitian ini menggunakan variabel data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi 5 pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, Netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Variabel Ketepatan Waktu Penyusunan laporan keuangan daerah diukur menggunakan indikator yaitu :

- 1) Aktivitas keuangan di masa lalu
- 2) Memprediksi masa yang akan datang
- 3) Pengambilan keputusan
- 4) Disajikan wajar dan jujur
- 5) Informasi dapat dibandingkan
- 6) Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami
- 7) Sesuai SAP³⁰

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.³¹ SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

²⁹ Nuryadin, D., Sodik, J., & Iskandar, D. 2000. *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*.

³⁰ Dellya Tiffany 2018, *Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara

³¹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005. Jakarta. Departemen Keuangan

Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan:

- 1) Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
 - a) Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - b) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - (1). Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan:
 - (2). Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah:
 - (3). Adanya pengaruh proses politik:
 - (4). Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah.
 - c) Ciri keuangan pemerintah yang Penting bagi pengendalian:
 - (1). Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal. dan sebagai alat pengendalian;
 - (2). Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan:
 - (3). Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

b. Sejarah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1) Latar Belakang Terbitnya SAP

Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2) Penetapan SAP

Proses penetapan PP SAP berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3) Sosialisasi Awal SAP

KSAP melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/ diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, dan lain-lain.

c. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Sukmaningrum menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.³²

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu orang yang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan suatu instansi haruslah paham tentang aturan

³² Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal-3*

ataupun standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dibuat berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Ihsanti bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman terhadap SAP berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.³³

d. Indikator Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penelitian ini menggunakan variabel data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi 5 pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, Netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berdasarkan PP 71, variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah diukur dengan indikator yaitu:

- 1) Memahami mengenai Neraca
- 2) Memahami mengenai laporan realisasi anggaran
- 3) Memahami mengenai laporan arus kas
- 4) Memahami mengenai catatan atas laporan keuangan
- 5) Memahami mengenai persediaan
- 6) Memahami mengenai investasi
- 7) Memahami mengenai asset tetap
- 8) Memahami mengenai kontruksi dalam pekerjaan
- 9) Memahami mengenai kewajiban
- 10) Memahami mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.³⁴

³³ Insani, Istyadi. 2010, *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, www.docstoc.com.

³⁴ Rafid, Rashwan Zuhudi, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Kabupaten Bone*. Skripsi Jurusan Akuntansi, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar:2016) Hal-34

3. Latar Belakang Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dilihat dari dua sisi, yaitu latar belakang pendidikan dan strata pendidikan dari perangkat SKPD.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dalam sistem pendidikan, jenjang pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Batasan tingkat pendidikan pejabat keuangan daerah dapat diartikan jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pejabat keuangan daerah. Dalam hal ini, jenjang pendidikan tinggi yang dimaksud adalah mencakup program atau tingkat diploma, sarjana, magister, dan doktor.

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. khususnya di Indonesia yaitu:

- 1) Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini intervensi dan pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.
- 2) Faktor eksternal, adalah masyarakat pada umumnya. Masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dan adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

Strata Pendidikan merupakan jenjang/ tingkatan yang ditempuh dalam pendidikan, terbagi atas:

1) Pendidikan dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang Pendidikan awal selama 6 (enam) tahun Pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah

2) Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun (termasuk pendidikan dasar). Pendidikan Menengah terbagi atas : Pendidikan Menengah pertama dan pendidikan Menengah Atas, dimana masing-masing pendidikan ditempuh selama 3 tahun

3) Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA

c. Indikator Variabel Latar Belakang Pendidikan

Dalam penelitian ini menggunakan variabel data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi 5 pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, Netral , tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Variabel Latar Belakang Pendidikan diukur dengan indikator yaitu:

- Starata Pendidikan
- Tingkat Pendidikan
- Kemampuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- Pendidikan dilakukan secara Periodik³⁵

³⁵ Wardani, Riana Nugrah, “Pengaruh latar belakang Pendidikan, Pengalaman kerja dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar:2004) Hal-36

4. Pelatihan

a. Pengertian Pelatihan

Peningkatan SDM melalui pelatihan (*training*) sangat Penting untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalisme para pegawai.³⁶ Dalam jangka pendek pelatihan merupakan suatu cara yang cukup strategis dalam membantu upaya peningkatan SDM suatu organisasi baik di pabrik maupun di kantor. Program pelatihan yang direncanakan dan berkesinambungan dapat mendorong para pegawai untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalismenya, sehingga akan berdampak pada kinerja mereka dan pada akhirnya akan dapat peningkatan kompetensi dan performa pegawai. Terdapat beberapa pengertian dari pelatihan yang dapat digunakan mendefinisikan pelatihan (*training*), diantaranya adalah:

- 1) Menurut Estiningsih, “Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang dan dalam pekerjaan lain yang terkait dengan yang sekarang dijabatnya. baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah team kerja”.³⁷
- 2) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , “Pelatihan adalah proses melatih: kegiatan atau pekerjaan”.³⁸
- 3) Menurut Junita Putri, “Pelatihan (*training*) diukur dari apa yang dapat kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan masa pelatihan itu. Training adalah melakukan. Training meningkatkan performance”.³⁹
- 4) Menurut Fitria “Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan. yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang”.⁴⁰

³⁶ Roesyanto, indah A., “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, (Medan:2007) Hal-12

³⁷ Estiningsih, Retno Utami, 2008. “Penerapan “*Learning Organitations*” Bagi Pengembangan SDM Organisasi”.hal-7

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

³⁹ Junita Putri Rajana Hrp Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Tahadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, skripsi Universitas Sumatera Utara (Medan:2009) Hal-29.

- 5) Menurut Martoyo, “Pelatihan (training) adalah usaha-usaha peningkatan pengetahuan niaupun keterampilan pegawai, sehingga didalamnya sudah menyangkut pengertian pendidikan (education)”.⁴¹
- 6) Menurut Junita Putri, “*Training* adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu”.⁴²
- 7) Menurut Westerman dan Donoghue dalam Yohanes, “Pelatihan sebagai pengembangan secara sistimatis pola sikap/pengetahuan keahlian yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memadai”.⁴³

Martoyo menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan antara pengertian pendidikan dengan pelatihan, namun perlu disadari bersama bahwa baik latihan (*training*) maupun pengembangan/pendidikan (*development*), keduanya menekankan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam *human relation*.⁴⁴

b. Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan

Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana terungkap dalam Peraturan Pemerintah No.101/2000:⁴⁵

1) Diklat Prajabatan

Diklat prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,

⁴⁰ Fitria, Elissa. 2011. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Aceh Tamiang*. Universitas Negeri Medan hal-26

⁴¹ Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: PT BPF – JogJakarta Hal-15

⁴² Junita Putri Rajana Hrp Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Tahadap Penyusunan Laporan Keuangan *ibid* Hal-29

⁴³ Enho, Yohanes. 2008. *Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahn Kota Medan*. USU hal-16

⁴⁴ Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. *Ibid* Hal-29

⁴⁵ Pemerintah RI, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 101/2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai*.

kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Diklat prajabatan terdiri atas:

- a) Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I:
- b) Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II:
- c) Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III.

2) Diklat dalam jabatan

Diklat dalam jabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri atas:⁴⁶

1) Diklat kepemimpinan (Diklatpim),

Diklatpim yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri atas:

- a) Diklatpim tingkat IV, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV:
- b) Diklatpim tingkat III, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon III:
- c) Diklatpim tingkat II, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon II: dan
- d) Diklatpim tingkat I, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon I.

2) Diklat fungsional

Diklat fungsional, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan fungsional masing-masing.

⁴⁶ Junita Putri Rajana Hrp Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, *ibid* Hal-28.

3) Diklat teknis

Diklat teknis, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

Kedua diklat tersebut (fungsional dan teknis) untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis yang bersangkutan.

c. Tahap-tahap Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan program pendidikan dan pelatihan PNS, maka salah satu prasyarat yang perlu dipedomani adalah melakukan prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan dengan senantiasa menerapkan pendekatan sistem melalui penerapan manajemen diklat yang efektif dan efisien. Menurut Najamudin terdapat 4 tahap dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi.⁴⁷

1) Perencanaan

Sebagai tahap awal dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training needs assessment) dengan mengidentifikasi dan mengukur adanya kesenjangan kemampuan yang secara nyata dikuasai aparatur dengan kemampuan yang seharusnya dikuasai aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan Training Needs Assesment dapat diketahui jenis pendidikan dan pelatihan apa yang sesungguhnya sangat dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan merupakan tuntutan tugas pokok dan fungsi tanggung jawab birokrasi di daerah.⁴⁸

⁴⁷ Najamudin, Lalu Muhamad, 2004. *“Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah”*, Tesis, Jurusan Manajemen Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴⁸ Revida, Erika, 2007. *“Penataan Ulang Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah”*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Administrasi Kepegawaian Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dessler membagi dua teknik utama dalam menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, yaitu analisis tugas dan analisis prestasi.

- a) Analisis Tugas merupakan suatu studi pekerjaan yang terperinci untuk menentukan jenis keterampilan khusus yang diperlukan pegawai,
- b) Analisis Prestasi adalah upaya memverifikasi fakta adanya kemunduran prestasi yang cukup berarti, dan kemudian menentukan apakah kemunduran itu harus diatasi melalui pendidikan dan pelatihan atau dengan cara lain, misalnya mengganti perangkat/peralatan atau memindahkan pegawai yang bersangkutan.⁴⁹

2) Pengorganisasian

Hasil analisis kebutuhan diklat tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun desain program pendidikan dan pelatihan mulai dari penetapan tujuan pelatihan, penetapan kurikulum/silabi, penetapan metode, penetapan peserta dan tenaga pengajar, strategi, evaluasi, maupun sarana dan prasarana yang diperlukan.

3) Penyelenggaraan

Setelah selesainya penyusunan desain program pendidikan dan pelatihan, maka program pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan. Dengan demikian dapat diharapkan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar merupakan proses transformasi untuk membentuk aparatur menjadi profesional, memiliki pengetahuan, sikap atau nilai atau etika pemerintahan yang baik (*good governance*) dan keahlian yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik.

4) Monitoring dan evaluasi

Kegiatan evaluasi terhadap hasil sebuah program pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui apakah tujuan sebuah program diklat yang telah dilaksanakan tercapai atau tidak. Hasil evaluasi tersebut

⁴⁹ Ancok, D. 1998. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

selanjutnya dapat menjadi umpan balik dalam penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan selanjutnya.⁵⁰

d. Metode Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan

Estiningsih menyatakan ada dua strategi pendidikan / pelatihan yang dapat dilakukan organisasi, yaitu metode di luar pekerjaan (*off the job side*) dan metode di dalam pekerjaan (*on the job side*).⁵¹

1) Metode di luar pekerjaan (*off the job side*)

Pada metode ini pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya. mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif. Metode ini terdiri dari 2 teknik, yaitu:

- a) Teknis presentasi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikap dan keterampilan baru kepada peserta. Teknik ini dapat dilakukan melalui ceramah biasa, teknik diskusi. teknik pemodelan perilaku (*behavioral modelling*), model kelompok T. yaitu mengirim pekerja ke organisasi yang lebih maju untuk mempelajari teori dan mempraktikkannya.
- b) Teknik simulasi, yaitu meniru perilaku sedemikian rupa sehingga peserta pendidikan dan latihan dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Teknik ini seperti: simulator alat-alat kesehatan, studi kasus (*case study*), permainan peran (*role playing*), dan teknik dalam keranjang (*in basket*), yaitu dengan cara memberikan bermacam-macam masalah dan peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan teori dan pengalamannya.

2) Metode di dalam pekerjaan (*on the job side*)

Pelatihan ini berbentuk penugasan pekerja baru, yang dibimbing oleh pegawai yang berpengalaman atau senior. Pekerja yang senior yang bertugas

⁵⁰ Kurnia, Nia, 2005. "Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah", Skripsi, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

⁵¹ Estiningsih, Retno Utami, 2008. "Penerapan "Learning Organitations" Bagi Pengembangan SDM Organisasi". *Ibid* hal-10

membimbing pekerja dan diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan perbandingan suatu pekerjaan yang jelas.

Selain kedua metode diatas, Estiningsih menyatakan bahwa terdapat beberapa metode lain yang dapat dilakukan dalam organisasi, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan organisasi langsung di tempat kerja, yaitu belajar sendiri (*self-learning*), tutorial, studi kasus, gugus kendali mutu.⁵²

a) *Self-Learning* (belajar sendiri)

Belajar secara mandiri merupakan suatu pembelajaran melalui *modul*, yaitu materi yang berisi langkah-langkah proses belajar yang sistematis. Modul disusun sedemikian rupa. sehingga peserta atau pembaca modul dapat dengan mudah dituntun untuk mempelajarinya langkah demi langkah. Kelebihan dan cara ini adalah menjamin kemampuan belajar tiap peserta, dapat menjangkau banyak peserta serta dengan cepat dapat menilai kecakapannya. Sedangkan kelemahannya, memerlukan banyak waktu dalam menyusul modul dan biaya pembuatan modul tinggi. Dalam hal ini diperlukan motivasi yang kuat dari peserta untuk belajar.

b) Tutorial

Tutorial adalah suatu metode dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan tugas baca pada suatu kelompok dengan topik tertentu yang kemudian didiskusikan dalam kelompok tersebut. Tujuan dan cara ini adalah untuk memantapkan pemahaman peserta terhadap materi. Dalam sistem ini peserta berinteraksi melalui diskusi ilmiah berdasarkan referensi yang tersedia dan hasilnya disusun dalam suatu makalah untuk kemudian dipresentasikan. Kelebihan metode ini adalah analisis suatu topik dibahas secara mendalam. sehingga menjamin dasar ilmiahnya dan terjadinya interaksi dalam kelompok.

c) Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu metode pembelajaran dengan mengajak peserta menganalisis masalah dan memilih alternatif-alternatif pemecahan

⁵² Estiningsih, Retno Utami, 2008. “Penerapan “*Learning Organisations*” Bagi Pengembangan SDM Organisasi”. *Ibid* hal-12

masalah. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta mengembangkan daya intelektualnya dan keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah.

d) Gugus Kendali Mutu

Gugus Kendali Mutu merupakan proses perbaikan kinerja staf secara terus menerus, melalui suatu wadah yang melibatkan staf pada tingkat pelaksana dalam kelompok kecil (3-8 orang) dan berada dalam satu lingkup kerja yang sama. Tujuan dari Gugus Kendali Mutu ini adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan semua staf berperan serta dalam memecahkan masalah di tempat kerjanya. guna meningkatkan mutu dan produktifitas kerja.⁵³

e. **Pendidikan dan Pelatihan dalam Perspektif islam**

Didalam Surah Al-Jumu'ah ayat 2 juga dijelaskan tentang Pendidikan dan pelatihan.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : *Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,*

Surah AL-Jumu'ah ayat 2 memiliki pesan, setidaknya terdapat tiga nilai-nilai pendidikan yang ditemukan yaitu nilai-nilai pendidikan tauhid yang tidak hanya menghimbau manusia untuk beriman kepada Allah saja melainkan juga untuk beriman kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai rasul, pendidikan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, strategi dan metode Rasulullah dalam mendidik sahabat-sahabatnya, serta tiga tugas seorang guru

⁵³ Junita Putri Rajana Hrp Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Tahadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, *ibid* Hal-33.

dalam mendidik yaitu membacakan (*tilawah*), mensucikan (*tazkiyah*), dan mengajarkan (*ta'lim*).

Setelah kita mempelajari konsep pendidikan dari menelaah surah Al-Jumu'ah ayat 2, maka kita bisa melihat bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan karena dengan pendidikan lah kita belajar tentang penyusunan laporan keuangan.

f. Indikator Variabel Pelatihan

Dalam penelitian ini menggunakan variabel data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi 5 pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, Netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Variabel Pelatihan diukur dengan indikator yaitu:

- Pengembangan sikap
- Pengembangan Skill dan Keterampilan
- Meningkatkan Pengetahuan⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

Enho, judul penelitian adalah Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman SAP (X1), Pendidikan dan Pelatihan (X2), Latar Belakang Pendidikan (X3), sedangkan variabel dependennya adalah Penyusunan Laporan Keuangan (Y). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 responden. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohannes adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan

⁵⁴ Ross, Melly. 2013. *Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Negeri Medan.

Pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Sedangkan Latar Belakang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.⁵⁵

2. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar.

Rajana, judul penelitian adalah Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman SAP (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2), Starta Pendidikan (X2.2), Pelatihan (X3), variabel dependennya adalah Penyusunan Laporan Keuangan (Y). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 39 orang. Hasil penelitian adalah Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif, sedangkan Strata Pendidikan dan Pelatihan memiliki hubungan yang positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.⁵⁶

3. Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Melly, Judul Penelitian adalah Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman SAP (X1), Lingkungan Kerja (X2), Komitmen (X3), serta Pendidikan dan Pelatihan (X4), Variabel Dependennya ialah Partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan (Y). Metode pengambilan

⁵⁵ Enho, Yohanes, 2008. "Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan", *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan

⁵⁶ Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar, 2009.

sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 45 orang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan. Sedangkan Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan.⁵⁷

4. Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)

Wayan Kusuma Wiraputra, Ni Kadek Sirnawati, Nyoman Trisna Herawati
Judul Penelitian adalah Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung) Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman SAP (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2). sedangkan variabel dependennya adalah Penyusunan Laporan Keuangan (Y). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 82 responden. Hasil penelitian mengenai Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan latar belakang Pendidikan terhadap penyusunan dan Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Pemahaman SAP (X1) mempunyai pengaruh Positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Sedangkan Latar Belakang Pendidikan (X2) mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Klungkung.⁵⁸

⁵⁷ Ross, Melly. 2013. *Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Negeri Medan.

⁵⁸ Wayan dkk 2014. *Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)* e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1

5. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan keuangan SKPD Kota Medan

Dellya Tiffany dengan Judul penelitian Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan keuangan SKPD Kota Medan. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman SAP (X1), Pendidikan (X2), Pelatihan (X3), variabel dependennya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan (Y). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 124 orang. Hasil penelitian adalah Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan secara Stimultan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.⁵⁹

⁵⁹ Dellya Tiffany 2018, *Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Enho (2008)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan	Independen Variabel: Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Serta Latar Belakang Pendidikan Dependen Variabel: Penyusunan Laporan Keuangan	Pemahaman SAP, Pendidikan Dan Pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan Latar Belakang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan.
2	Rajana (2009)	Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar	Independen Variabel: Pemahaman Sap, Pendidikan dan Pelatihan serta latar belakang pendidikan dan strata pendidikan Dependen Variabel: Penyusunan	Pemahaman SAP, Latar Belakang, Strata Pendidikan Dan Pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif, Sedangkan Strata Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

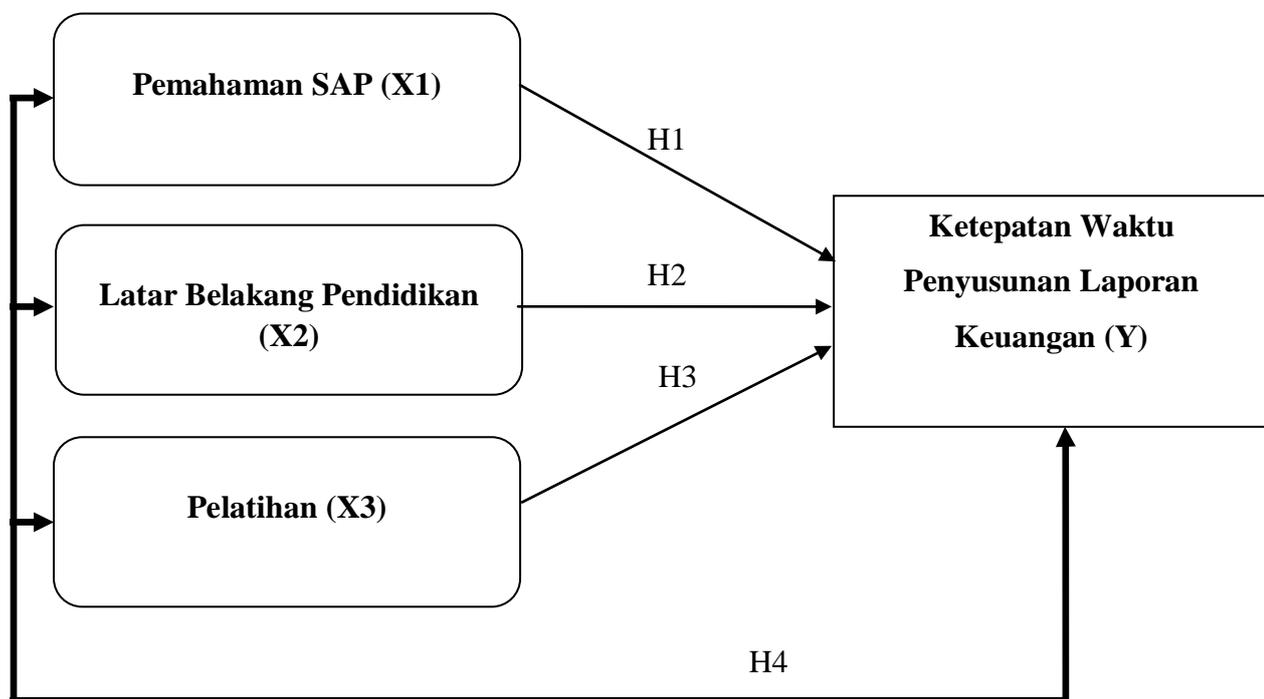
			Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
3	Melly (2013)	Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan	Independen Variabel: Pemahaman Sap, Lingkungan Kerja, Komitmen, Pendidikan dan Pelatihan Dependen Variabel: Partisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	pemahaman SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan. Sedangkan Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan.
4	Wayan dkk	Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan	Independen Variabel: Pemahaman Sap, Latar belakang Pendidikan Dependen Variabel: Penyusunan dan penyajian	Pemahaman SAP mempunyai pengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Sedangkan Latar Belakang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif

		Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Klungkung
5	Tiffany (2018)	Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan keuangan SKPD Kota Medan	Independen Variabel: Pemahaman Sap, Pendidikan dan Pelatihan Dependen Variabel: Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan secara Stimultan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen Pemahaman SAP, serta Pendidikan dan Pelatihan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

Didalam kerangka konseptual ini menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial dan simultan. Adapun gambar kerangkanya seperti dibawah ini:



Keterangan :

- : Berpengaruh secara parsial
- : Berpengaruh secara simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁶⁰

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka Pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

- H_{a1}. Pemahaman SAP berpengaruh terhadap Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.
- H_{o1}. Pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan.
- H_{a2}. Latar belakang Pendidikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.
- H_{o2}. Latar belakang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.
- H_{a3}. Pelatihan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.
- H_{o3}. Pelatihan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.
- H_{a4}. Pemahaman SAP, Latar belakang pendidikan dan pelatihan, berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.
- H_{o4}. Pemahaman SAP, Latar belakang pendidikan dan pelatihan, tidak berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan.

⁶⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana yang terstruktur dari penyelidikan yang digambarkan untuk memperoleh jawaban tentang pertanyaan penelitian. Pada pengertian luas, desain penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perancangan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam arti sempit dan khusus, desain penelitian adalah prosedur pengumpulan dan analisis data, yang dalam artian menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis apa saja yang digunakan untuk menjelaskan penelitian.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau matematis yang dianalisis berdasarkan masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.

Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur. Penelitian ini berusaha mengungkapkan pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan latar belakang pendidikan dan pelatihan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Medan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret

¹ Arfan Ikhsan. Misri, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 86.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (2019)								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Menentukan Judul Penelitian									
Pembuatan Proposal									
Seminar Proposal									
Proses Bimbingan									
Pengumpulan data									
Pengolahan data									
Penulisan laporan									
Ujian Skripsi									

A. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Medan, dengan Subyek Penelitian Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Pada setiap SKPD.

² Sugiono, 2008, *Metode penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*, Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Alfabeta, Bandung. h. 72

Tabel 3.2
Populasi Penelitian
SKPD Pemerintah Kota Medan

No.	Badan/Dinas/Kantor
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
5	Dinas Sosial
6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
7	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
8	Dinas Ketenagakerjaan
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Usaha Kecil, dan Menengah
18	Dinas Pertanian dan Perikanan
19	Dinas Perindustrian
20	Dinas Perdagangan
21	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Dinas Pariwisata
23	Dinas Kebudayaan
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Badan Penelitian dan Pengembangan
28	Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
30	Bagian Sosial dan Pendidikan
31	Bagian Pemerintahan
32	Bagian Hubungan Masyarakat
33	Bagian Keagamaan
34	Bagian Perekonomian
35	Bagian Pembangunan
36	Bagian Hubungan Antar Kota, Daerah, Lembaga
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat
38	Bagian Organisasi dan Tatalaksana
39	Bagian Hukum
40	Bagian Umum
41	Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
42	Kecamatan Medan Tembung
43	Kecamatan Medan Baru
44	Kecamatan Medan Labuhan
45	Kecamatan Medan Belawan
46	Kecamatan Medan Petisah
47	Kecamatan Medan Kota
48	Kecamatan Medan Timur
49	Kecamatan Medan Perjuangan
50	Kecamatan Medan Johor
51	Kecamatan Medan Deli
52	Kecamatan Medan Maimun
53	Kecamatan Medan Polonia
54	Kecamatan Medan Amplas

55	Kecamatan Medan Denai
56	Kecamatan Medan Barat
57	Kecamatan Medan Sunggal
58	Kecamatan Medan Tuntungan
59	Kecamatan Medan Area
60	Kecamatan Medan Helvetia
61	Kecamatan Medan Marelan
62	Kecamatan Medan Selayang

2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin meneliti semua anggota populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.³

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampel Jenuh/ *Sensus*, karena sampel yang diambil hanya yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perangkat SKPD yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Kepala Bagian Keuangan SKPD dan Bendahara di masing-masing SKPD. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 124 sampel.

B. Jenis/Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan metode angket/kuesioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan pegawai di bagian keuangan. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan, kemudian memintanya untuk mengembalikannya kepada peneliti yang secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi.

³ *Ibid* h-72

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Dimana ketepatan waktu adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

2. Variabel Independen (X)

a. Variabel Pemahaman terhadap SAP (X1)

Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

b. Variabel Latar Belakang Pendidikan (X2)

Latar Belakang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

c. Variabel Pelatihan (X3)

Pelatihan adalah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan para perangkat kerja yang bertujuan untuk memperbaiki dan pengembangan.

Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan skala likert, dan dibuat dalam bentuk disilang (X). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan untuk satu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut antara lain, sangat setuju (SS) dengan 5 poin, Setuju (ST) dengan 4 poin, netral (NT) dengan 3 poin, tidak setuju (TS) dengan 2 poin, sangat tidak setuju (STS) dengan 1 poin.

Tabel 3.3.
Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Varibel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Variabel	Skala Penelitian
Dependen Variabel			
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Ketepatan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Dimana ketepatan laporan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> – Aktivitas keuangan di masa lalu – Memprediksi masa yang akan datang – Pengambilan keputusan – Disajikan wajar dan jujur – Informasi dapat dibandingkan – Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami – Sesuai SAP 	Likert
Independen Variabel			
Pemahaman SAP	Pemahaman terhadap SAP adalah pemahaman atas prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> – Memahami mengenai Neraca – Memahami mengenai laporan realisasi anggaran – Memahami mengenai laporan arus kas 	Likert

		<ul style="list-style-type: none">- Memahami mengenai catatan atas laporan keuangan- Memahami mengenai persediaan- Memahami mengenai investasi- Memahami mengenai asset tetap- Memahami mengenai kontruksi dalam pekerjaan- Memahami mengenai kewajiban- Memahami mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa	
--	--	--	--

Latar Belakang Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> – Starata Pendidikan – Tingkat Pendidikan – Kemampuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan – Pendidikan dilakukan secara Periodik 	Likert
Pelatihan	Pelatihan adalah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan para perangkat kerja yang bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan sikap – Pengembangan Skill dan Keterampilan – Meningkatkan Pengetahuan 	Likert

D. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono, “Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya”. Metode analisis statistik deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan.⁴

E. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data

1. Pengujian Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur.⁵ “Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain ketidakpatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner”.⁶

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r hitung negatif atau r hitung $<$ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- c. r hitung dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total correlation*.

2. Pengujian Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.⁷

⁴ Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung. h-11

⁵ Ancok, Djamiludin, 1998. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. h.120

⁶ Sugiyono, 2007. *Metode PenelitianBisnis*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung. h-102

⁷ Junita Putri Rajana Hrp : Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar 2009 h.45

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5.⁸

F. Pengujian Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogrov Smirnov*.⁹

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatter plot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika :¹⁰

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Jika hasil output *Scatter plot* demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

⁸ Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. H.42

⁹ V. Wiranta Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52.

¹⁰ *ibid.*, h. 186-187.

3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah:

- a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.

Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu :

- 1) Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi.
- 2) Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge.

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari model penelitian, jika nilai VIF diatas 2, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian.¹¹

G. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menentukan hubungan yang berlaku antara pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan terhadap partisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Medan.

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi.¹²

Adapun persamaan dalam regresi linier sederhana sebagai berikut:

¹¹ *Ibid* h.179-183

¹² Duwi Priyatno, *SPSS HANDBOOK*, (Yogyakarta: MediaKom, 2016), h. 92.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Penyusunan Laporan Keuangan

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan variabel Y

X1 = Pemahaman SAP

X2 = Latar Belakang Pendidikan

X3 = Pelatihan

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dalam menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci sehingga analisis akan mudah dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan.

H. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tingkat signifikansi yang digunakan pada uji F ini digunakan $\alpha = 5\%$ yang artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh lebih kecil atau sama dengan 5%. Jika lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut tidak layak dipakai

2. Pengujian Simultan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya adalah :

Ho : $b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha : $b_1 \neq 0$, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas < 0.10 , maka H_a diterima

Jika probabilitas > 0.10 , maka H_a ditolak.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.¹³ Selanjutnya, menerangkan bahwa koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

¹³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit-UNDIP), h. 98.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba. Medan didirikan oleh Guru Patimpuss Sembiring Pelawi pada tahun 1590. Jhon Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 merupakan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Brayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting diluar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.

Kota Medan dipimpin oleh seorang walikota. Saat ini, jabatan wali kota Medan dijabat oleh Dzulmi Eldin dengan jabatan wakil walikota dijabat oleh Akhyar Nasution. Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relative besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3°30' - 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44'. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Deli Serdang
Barat	Kabupaten Deli Serdang
Timur	Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri.

B. Deskripsi Data Penelitian

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan uraian atau penjelasan dari hasil pengumpulan data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan menyebarkan 124 kuesioner kepada responden pada kebag keuangan dan bendahara seluruh SKPD Kota Medan. Dari 124 kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 kuesioner yang kembali.

Tabel 4.1 dibawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*)

Tabel 4.1
Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	124
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang tidak kembali	24
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	100
Tingkat pengembalian (<i>respon rate</i>)($100/124 \times 100\%$)	81%

Sumber : Data primer diolah, 2019

C. Hasil Analisis Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu alat pengukur atau instrumen pertanyaan dapat mengukur apa yang ingin diukur. Adapun uji validitas yang dilakukan dalam penelitian adalah uji validitas untuk setiap butir pernyataan menggunakan korelasi *pearson* dengan tingkat signifikansi 5 % atau 0,05 yang membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan kriteria valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas pertanyaan dari variabel Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan (Y), Pemahaman SAP (X1), Latar Belakang Pendidikan(X2), Pelatihan(X3).

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r^{tabel} (n=100)	Keterangan
Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan (Y)	Y.1	.795	0.197	Valid
	Y.2	.780	0.197	Valid
	Y.3	.743	0.197	Valid
	Y.4	.803	0.197	Valid
	Y.5	.685	0.197	Valid
	Y.6	.727	0.197	Valid
Pemahaman SAP (X1)	X1.1	.812	0.197	Valid
	X1.2	.874	0.197	Valid
	X1.3	.884	0.197	Valid
	X1.4	.696	0.197	Valid
	X1.5	.787	0.197	Valid
	X1.6	.843	0.197	Valid
Latar Belakang pendidikan (X2)	X2.1	.670	0.197	Valid
	X2.2	.711	0.197	Valid
	X2.3	.816	0.197	Valid
	X2.4	.729	0.197	Valid
	X2.5	.765	0.197	Valid
	X2.6	.550	0.197	Valid
Pelatihan (X3)	X3.1	.590	0.197	Valid
	X3.2	.442	0.197	Valid
	X3.3	.731	0.197	Valid
	X3.4	.554	0.197	Valid
	X3.5	.654	0.197	Valid
	X3.6	.653	0.197	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019

Untuk mengetahui validitas pada setiap pertanyaan, maka nilai pada kolom kolerasi (*Collected item-total colleration*) yang merupakan nilai rhitung dibandingkan dengan rtabel. Untuk menentukan nilai rtabel terlebih dahulu dihitung nilai derajat bebas (*degree of freedom*) dengan rumus $n-2$, dimana n menyatakan banyaknya responden untuk uji validitas. Diketahui jumlah responden yang dilibatkan untuk uji validitas kuisisioner sebanyak $n=100$, sehingga derajat bebas bernilai $n-2=100-2=98$ maka diperoleh $rtabel=0,197$. Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien kolerasi (*Corrected Item-total colleration*) yang mendapat nilai lebih besar dari $rtabel=0.197$. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.2 diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Realibilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas terhadap instrumen pernyataan dan hanya instrumen pernyataan yang dinyatakan valid yang dapat diuji reliabilitas. Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian realibilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu instrument dinyatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	0,900	6	Valid
Latar Belakang Pendidikan	0,797	6	Valid
Pelatihan	0,648	6	Valid
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	0,791	6	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* atas variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 0,900, variabel Latar belakang pendidikan sebesar 0,797, variabel pelatihan sebesar 0,648 dan variabel ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan sebesar 0,791 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban kembali.

D. Analisis Deskriptif Variabel

1. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X₁)

Tabel 4.4

Frekuensi Responden Terhadap Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pernyataan												
P1	10	10%	72	72%	18	18%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P2	12	12%	68	68%	20	20%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P3	21	21%	57	57%	22	22%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P4	20	20%	70	70%	10	10%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P5	8	8%	73	73%	19	19%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P6	13	13%	63	63%	24	24%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%

Sumber: Data angket diolah 2019

- 1) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 18 responden (18%) yang menyatakan Netral, 72 responden (72%) yang menyatakan setuju dan 10 responden (10%) yang menyatakan sangat setuju .
- 2) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 20 responden (20%) yang menyatakan Netral, 68 responden (68%) yang

menyatakan setuju dan 10 responden (12%) yang menyatakan sangat setuju .

- 3) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 22 responden (22%) yang menyatakan Netral, 57 responden (57%) yang menyatakan setuju dan 21 responden (21%) yang menyatakan sangat setuju .
- 4) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 10 responden (10%) yang menyatakan Netral, 70 responden (70%) yang menyatakan setuju dan 20 responden (20%) yang menyatakan sangat setuju .
- 5) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 19 responden (19%) yang menyatakan Netral, 73 responden (73%) yang menyatakan setuju dan 8 responden (8%) yang menyatakan sangat setuju .
- 6) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 13 responden (13%) yang menyatakan Netral, 63 responden (63%) yang menyatakan setuju dan 24 responden (24%) yang menyatakan sangat setuju .

2. Variabel Latar Belakang Pendidikan (X_2)

Tabel 4.5
Frekuensi Responden Terhadap
Variabel Latar Belakang Pendidikan

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	41	41%	31	31%	23	23%	5	5%	0	0.0%	100	100%
P2	35	35%	42	42%	14	14%	8	8%	1	1%	100	100%
P3	23	23%	52	52%	15	15%	9	9%	1	1%	100	100%
P4	32	32%	46	46%	19	19%	3	3%	0	0.0%	100	100%
P5	34	34%	53	53%	10	10%	3	3%	0	0.0%	100	100%
P6	42	42%	36	36%	21	21%	1	1%	0	0.0%	100	100%

Sumber: Data angket diolah 2019

- 1) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 5 responden (5%) yang menyatakan tidak setuju, 23 responden (23%) yang menyatakan Netral, 31 responden (31%) yang menyatakan setuju dan 41 responden (41%) yang menyatakan sangat setuju .
- 2) 1 responden (1%) yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden (8%) yang menyatakan tidak setuju, 14 responden (14%) yang menyatakan Netral, 42 responden (42%) yang menyatakan setuju dan 35 responden (35%) yang menyatakan sangat setuju .
- 3) 1 responden (1%) yang menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden (9%) yang menyatakan tidak setuju, 15 responden (15%) yang menyatakan Netral, 52 responden (52%) yang menyatakan setuju dan 23 responden (23%) yang menyatakan sangat setuju .
- 4) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 3 responden(3%) yang menyatakan tidak setuju, 19 responden (19%) yang menyatakan Netral, 46 responden (46%) yang menyatakan setuju dan 32 responden (32%) yang menyatakan sangat setuju .
- 5) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 3 responden(3%) yang menyatakan tidak setuju, 10 responden (10%) yang menyatakan Netral, 53 responden (53%) yang menyatakan setuju dan 34 responden (34%) yang menyatakan sangat setuju.
- 6) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (1%) yang menyatakan tidak setuju, 21 responden (21%) yang menyatakan Netral, 36 responden (36%) yang menyatakan setuju dan 42 responden (42%) yang menyatakan sangat setuju .

3. Variabel Pelatihan (X_3)

Tabel 4.6
Frekuensi Responden Terhadap
Variabel Pelatihan

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	49	49%	39	39%	10	10%	2	2%	0	0.0%	100	100%
P2	38	38%	52	52%	8	8%	2	2%	0	0.0%	100	100%
P3	45	45%	46	46%	9	9%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P4	45	45%	44	44%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P5	47	47%	43	43%	9	9%	1	1%	0	0.0%	100	100%
P6	35	35%	45	45%	15	15%	5	5%	0	0.0%	100	100%

Sumber: Data angket diolah 2019

- 1) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden (2%) yang menyatakan tidak setuju, 10 responden (10%) yang menyatakan Netral, 39 responden (39%) yang menyatakan setuju dan 49 responden (49%) yang menyatakan sangat setuju .
- 2) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden (2%) yang menyatakan tidak setuju, 8 responden (8%) yang menyatakan Netral, 52 responden (52%) yang menyatakan setuju dan 38 responden (38%) yang menyatakan sangat setuju .
- 3) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 9 responden (9%) yang menyatakan Netral, 46 responden (46%) yang menyatakan setuju dan 45 responden (45%) yang menyatakan sangat setuju .
- 4) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 11 responden (11%) yang menyatakan Netral, 44 responden (44%) yang menyatakan setuju dan 45 responden (45%) yang menyatakan sangat setuju.

- 5) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (1%) yang menyatakan tidak setuju, 9 responden (9%) yang menyatakan Netral, 43 responden (43%) yang menyatakan setuju dan 47 responden (47%) yang menyatakan sangat setuju .
- 6) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 5 responden (5%) yang menyatakan tidak setuju, 15 responden (15%) yang menyatakan Netral, 45 responden (45%) yang menyatakan setuju dan 35 responden (35%) yang menyatakan sangat setuju .

4. Variabel Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.7

**Frekuensi Responden Terhadap Variabel
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan**

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pernyataan												
P1	23	23%	56	56%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P2	25	25%	64	64%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P3	25	25%	55	55%	16	16%	4	4%	0	0.0%	100	100%
P4	27	27%	44	44%	21	21%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P5	21	21%	68	68%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P6	24	24%	59	59%	17	17%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%

Sumber: Data angket diolah 2019

- 1) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 11 responden (11%) yang menyatakan Netral, 56 responden (56%) yang menyatakan setuju dan 23 responden (23%) yang menyatakan sangat setuju .
- 2) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 11 responden (11%) yang menyatakan Netral, 64 responden (64%) yang menyatakan setuju dan 25 responden (25%) yang menyatakan sangat setuju .
- 3) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden (4%) yang

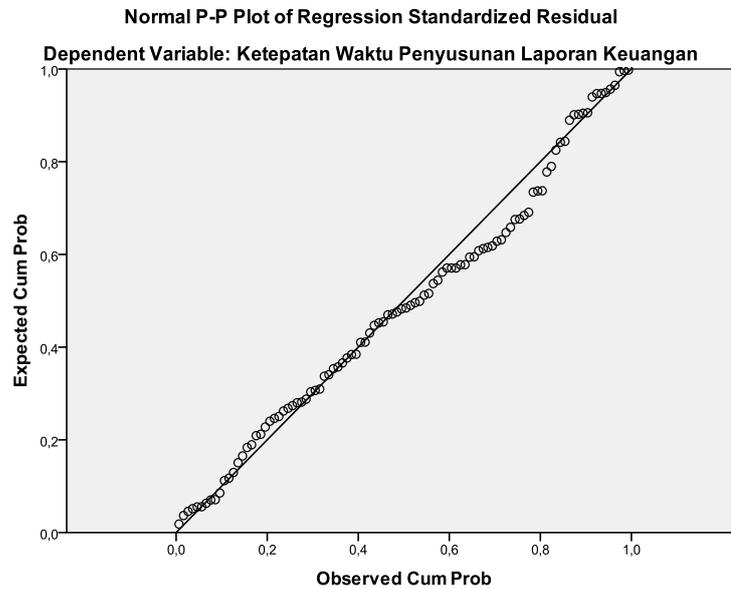
menyatakan tidak setuju, 16 responden (16%) yang menyatakan Netral, 55 responden (55%) yang menyatakan setuju dan 25 responden (21%) yang menyatakan sangat setuju .

- 4) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 21 responden (21%) yang menyatakan Netral, 44 responden (44%) yang menyatakan setuju dan 27 responden (27%) yang menyatakan sangat setuju .
- 5) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 11 responden (11%) yang menyatakan Netral, 68 responden (68%) yang menyatakan setuju dan 21 responden (21%) yang menyatakan sangat setuju .
- 6) Tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 17 responden (17%) yang menyatakan Netral, 59 responden (59%) yang menyatakan setuju dan 24 responden (24%) yang menyatakan sangat setuju .

E. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

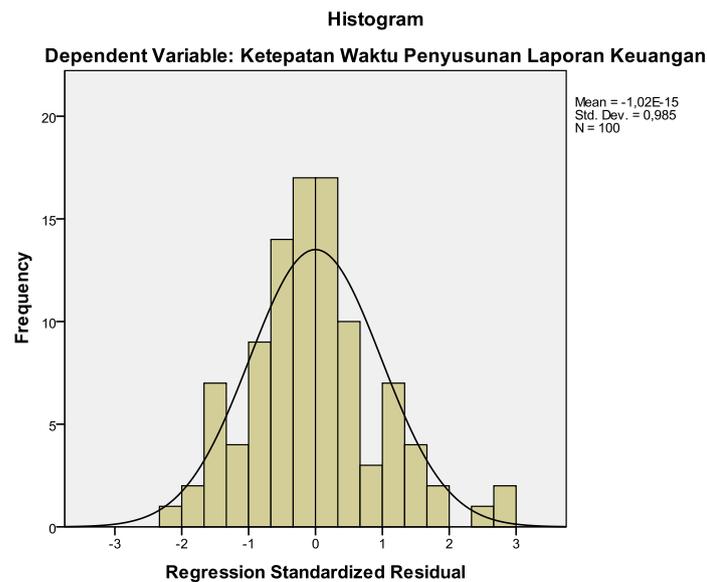
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data instrument penelitian terdistribusi secara normal maka telah memenuhi model regresi yang baik. Untuk menguji normalitas data penelitian ini menggunakan *Normal Probability Plot* yang membandingkan data distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Grafik *Normal Probability Plot* yang berdistribusi normal menunjukkan pola atau titik – titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal.



Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik – titik atau pola menyebar disekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.2 berikut ini:



Gambar 4.2 Histogram Normal P-P Plot

Grafik histogram pada gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa distribusi data memiliki kurva berbentuk lonceng dimana distribusi data tidak menceng ke kiri maupun menceng ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini juga didukung dengan menggunakan normal p-plot regression.

Hasil uji normalitas juga dapat didapat dengan menggunakan pendekatan Kolmogorof – Smirnov. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% maka jika nilai Pvalue (Sig.) di atas nilai signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Diagram histogram pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,95281196
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,865
Asymp. Sig. (2-tailed)		,443

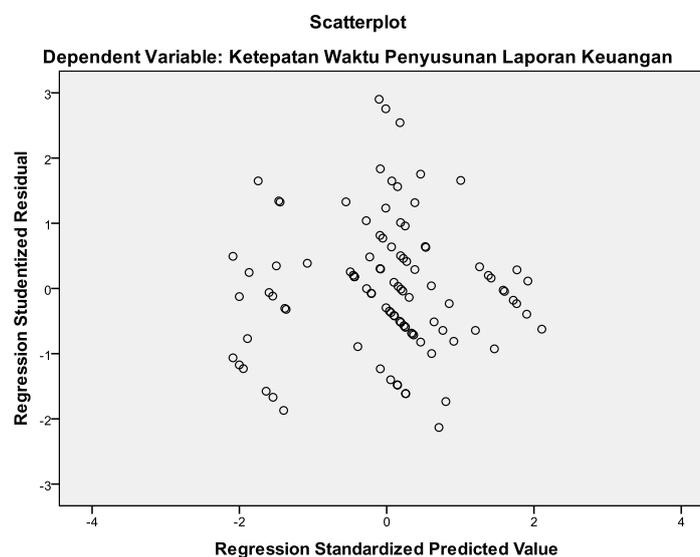
Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,443. Karena nilai signifikan 0,443 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

2. Hasil Uji Heterokesdatisitas

Menurut Ghozali “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”.¹ Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heterokesdatisitas dan jika tetap disebut homokesdatisitas. Model regresi yang layak dalam memprediksi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan adalah model regresi yang tidak mengalami heterokesdatisitas.

Pengujian heterokesdatisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatter plot dengan melihat nilai prediksi dependen variabel (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedasitas. Menurut Ghozali “Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y maka terjadi homoskedastisitas”.² Gambar berikut menampilkan pola titik-titik untuk mengetahui heterokesdatisitas.



Gambar 4.3 Scatter Plot Uji Heterokesdatisitas

¹ Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerit Universitas Dipenogoro. Hal-139

² Ghozali, Imam 2005. *Ibid* Hal-105

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan pola titik – titik pada grafik scatter plot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah titik nol (0) pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heterokedstisitas, sehingga model regresi layak dipakai.

3. Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflasing Factor (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai VIF <10 dan nilai tolerance $> 0,1$. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman SAP	,980	1,020
Latar Belakang Pendidikan	,805	1,243
Pelatihan	,794	1,260

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai VIF setiap variabel dibawah 10 dan nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1 sehingga tidak terdapat hubungan atau korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa data penelitian tidak mengalami multikolinearitas sehingga model regresi yang ada layak dipakai dalam memprediksi Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

F. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik atau analisis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), Latar Belakang pendidikan dan pelatihan dalam memprediksi variabel terikat (dependen) yaitu ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Apabila variabel independen mengalami kenaikan dan penurunan, juga untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Adapun rumus regresi linier berganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penyusunan Laporan Keuangan

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan variabel Y

X1 = Pemahaman SAP

X2 = Latar Belakang Pendidikan

X3 = Pelatihan

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,897	2,879		3,090	,003
	Pemahaman SAP	,755	,072	,719	10,453	,000
	Latar Belakang Pendidikan	,090	,062	,110	1,456	,149
	Pelatihan	-,170	,087	-,150	-1,967	,052

Dari tabel 4.10 diatas maka persamaan regresi yang terbentuk dari uji ini adalah :

$$Y = 8,897 + 0,755 X_1 + 0,090 X_2 - 0,170 X_3 + e$$

Persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1) Nilai konstanta

Konstanta (α) = 8,897 ini menunjukkan jika variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(X₁), Latar Belakang Pendidikan (X₂), Pelatihan(X₃) =0, maka ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan = 8,897.

2) Nilai Variabel X₁ (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Nilai Variabel X₁ (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)) sebesar 0,755 artinya variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi pemahaman tentang ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan yaitu sebesar 0,755 atau 7,55%. Hal ini berarti bila Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meningkat sebesar kelipatan 1x maka akan mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan ikut meningkat yaitu sebesar 7,55%, demikian juga sebaliknya.

3) Nilai Variabel X2 (Latar Belakang Pendidikan)

Nilai Variabel X2 (Latar Belakang Pendidikan) sebesar 0,090 artinya variabel latar belakang Pendidikan memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi pemahaman tentang ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan yaitu sebesar 0,090 atau 0,90%. Hal ini berarti bila latar belakang Pendidikan meningkat sebesar kelipatan 1 x maka akan mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan ikut meningkat yaitu sebesar 0,90%, demikian juga sebaliknya.

4) Nilai Variabel X3 (Pelatihan)

Nilai Variabel X3 (Pelatihan) sebesar -0,170 artinya variabel Pelatihan memberikan kontribusi Negatif dalam mempengaruhi pemahaman tentang ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan yaitu sebesar -0,170 atau -1,70%. Hal ini berarti bila Pelatihan meningkat sebesar kelipatan 1 x maka akan mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan menurun yaitu sebesar -1,70%, demikian juga sebaliknya.

G. Uji Hipotesis

1. Hasil Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria pengujian yang digunakan adalah

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (n-k-1)$ dan jika signifikansi $< 0,05$ maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap nilai variabel (Y).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (n-k-1)$ dan jika signifikansi $> 0,05$ maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel (Y).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai F dan signifikansi secara simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji simultan (Uji-F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470,466	3	156,822	39,877	,000 ^a
	Residual	377,534	96	3,933		
	Total	848,000	99			

Data primer diolah, 2019

Nilai F tabel diperoleh dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikan 5%, dengan rumus untuk df 1 = (jumlah variabel – 1) = (4-1=3) dan df 2 = (n-k-1) = (100-3-1=96) maka diperoleh F tabel sebesar 2,70. Pada tabel 4.10 nilai F hitung > F tabel yaitu 39,877 > 2,70 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. maka artinya pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

2. Hasil Pengujian Parsial (Uji-T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), Latar belakang pendidikan dan pelatihan terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 5%.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah

- Jika t hitung > t tabel (n-k-1), jika signifikansi < 0,05 maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Jika t hitung < t tabel (n-k-1), jika signifikansi > 0,05 maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Nilai t tabel diperoleh dengan $df = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$ maka nilai t tabel diperoleh sebesar 1,66. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,897	2,879		3,090	,003
	Pemahaman SAP	,755	,072	,719	10,453	,000
	Latar Belakang Pendidikan	,090	,062	,110	1,456	,149
	Pelatihan	-,170	,087	-,150	-1,967	,052

Sumber: data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dari tabel 4.11 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki nilai thitung $>$ ttabel dimana $10,453 > 1,66$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
- 2) Variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai thitung $<$ ttabel dimana $1,456 < 1,66$ dengan tingkat signifikansi $0,149 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
- 3) Variabel pelatihan memiliki nilai thitung $<$ ttabel dimana $-1,967 < 1,66$ dengan tingkat signifikansi $0,052 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan, dan pelatihan dalam menjelaskan variabel dependen yaitu ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom adjusted R square, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,745 ^a	,555	,541

Sumber: data primer diolah, 2019

Tabel 4.12 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.555 atau 55%, ini menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan, dan pelatihan adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya sebesar 45% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

H. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Latar Belakang Pendidikan, dan Pelatihan terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan

Dari hasil uji simultan, nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $39,887 > 2,70$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. maka artinya pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dellyla Tiffany, yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan jika pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

2. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan

Dari hasil uji parsial variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki nilai thitung $>$ ttabel dimana $10,453 > 1,66$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dellya Tiffany, yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan jika pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melly Ross, yang mengatakan bahwa pemahaman SAP memiliki pengaruh signifikan namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Rajana bahwa pemahaman SAP memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.

3. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan

Dari hasil uji parsial Variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai thitung $<$ ttabel dimana $1,456 < 1,66$ dengan tingkat signifikansi $0,149 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dellya Tiffany, yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Enho bahwa Latar Belakang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, penelitian yang dilakukan oleh Wayan Kusuma Wiraputra, Ni Kadek Sirnawati, Nyoman Trisna Herawati

juga menyatakan bahwa Latar Belakang Pendidikan (X2) mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

4. Pengaruh Pelatihan terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan

Dari hasil uji parsial variabel pelatihan memiliki nilai thitung $<$ ttabel dimana $-1,967 < 1,66$ dengan tingkat signifikansi $0,052 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa pelatihan mempunyai hubungan negatif serta tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes yang mengemukakan bahwa Pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Tiffany bahwa pelatihan mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan - kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Uji F, pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
2. Hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
3. Hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
4. Hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel pelatihan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.
5. Hasil pengujian secara koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), latar belakang pendidikan, dan pelatihan adalah sebesar 55%, sedangkan sisanya sebesar 45% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan pemerintah Kota Medan mampu meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dengan peningkatan pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan yang didukung dengan pemanfaatan sistem akuntansi yang baik yang tentunya harus dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, dimana kompetensi sumber daya manusia mencakup tingkat pendidikan, pemahaman, dan pengalaman.
2. Pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan karena telah melalui proses akademis dalam pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan. Adapun staf yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi bisa melalui berbagai pelatihan terlebih dahulu untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitatif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PP No 71 Tahun 2010.
3. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat memperluas variabel-variabel lain. Sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan terhadap pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dan disarankan untuk dapat memperoleh sampel yang representatif dari populasi suatu pengamatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 1998. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aswadi, Sri Ayu Wulandari. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta
- Cohen, S., dan S. Leventis. 2012. *Effects Of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay*. *Accounting Forum*, 37 (2013)
- Darno, 2013. *Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah kerja KPPN Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Duwi Priyatno, SPSS HANDBOOK, (Yogyakarta: MediaKom, 2016)
- Effendi, Sofyan, 2007. *Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Makalah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hal 21
- Enho, Yohanes, 2008. *“Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan”*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Estiningsih, Retno Utami, 2008. *“Penerapan “Learning Organitations” Bagi Pengembangan SDM Organisasi”*
- Fitria, Elissa. 2011. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Aceh Tamiang*. Universitas Negeri Medan
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____ 2011. *Aplikasi Analisis Mulvariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerit Universitas Dipenogoro.

- Hersona, H. Sonny, Rismayadi, B., Mariah, Euis Siti. 2012. *Analisis pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai pada Bapan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang*. Jurnal Manajemen. Vol. 09 No.3: 717-729
- Ikhsan, Arfan Misri, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012)
- Ihsanti, Emilda, 2014, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Artikel, Universitas Negeri Padang*.
- Insani, Istyadi. 2010, *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, www.docstoc.com.
- Junita Putri Rajana Hrp *Pengaruh Pemahaman Sap, Pendidikan, Dan Pelatihan Tahadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar*, skripsi Universitas Sumatera Utara (Medan:2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005*. Jakarta. Departemen Keuangan
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kurnia, Nia, 2005. "Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah", Skripsi, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1
- Martani, Dwi et. al. *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.

- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: PT BPFJ
JogJakarta
- McLelland, A., Giroux, G., 2000. *An Empirical Analysis of Auditor Report Timing
by Large Municipalities*. Journal of Accounting and Public Policy 19.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur (Menpan), 2005. “*Reformasi Birokrasi untuk
Mewujudkan Good and Clean Government*”, Makalah, Sespati Polri,
Bandung.
- Najamudin, Lalu Muhamad, 2004. “*Manajemen Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah*”, Tesis, Jurusan Manajemen Publik, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
PT. Rineka Cipta.
- Nuryadin, D., Sodik, J., & Iskandar, D. 2000. *Aglomerasi dan Pertumbuhan
Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*.
- Pemerintah RI, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 101/2000 tentang *Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi
Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi
Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan
Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rafid, Rashwan Zuhudi, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel
Moderasi Pada Pemerintahan Kabupaten Bone*. Skripsi Jurusan
Akuntansi, universitas Islam Negri Alauddin Makassar, (Makassar:2016)

- Rachmawi, Sella, dkk 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia* Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)
- Revida, Erika, 2007. “*Penataan Ulang Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Administrasi Kepegawaian Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Roesyanto, Indah A., 2007. “*Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan*”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Ross, Melly. 2013. *Pengaruh Pemahaman SAP, Lingkungan Kerja, Komitmen serta Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Partisipasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Negeri Medan.
- Suwardjono. 2005. *teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, 2008, *Metode penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*, Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Tiffany, Dellya 2018, *Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Perbendaharaan Negara*

V. Wiranta Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015),

Wardani, Riana Nugrah, "*Pengaruh latar belakang Pendidikan, Pengalaman kerja dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementrian Agama Kota Makasar*", Skripsi, Jurusan Akuntansi, universitas Islam Negri Alauddin Makassar, (Makassar:2004)

Warisno, 2009, *Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

Warren, Carl. S, James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wayan dkk 2014. *Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)* e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1

Zurnali, Cut. 2004. *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia, Tbk*. Tesis Bandung: Universitas Padjajaran.

<https://pemkomedan.go.id/artikel-18680-wali-kota-serahkan-laporan-keuangan-pada-bpk-perwakilan-sumut-.html> diakses pada 18 September 2019 pukul 09.11 Wib

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

Kepada Yth : Bapak/Ibu Responden

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Skripsi Program Studi S-1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Latar Belakang Pendidikan, dan Pelatihan terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Medan”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada partisipasi Bapak/Ibu. Atas dukungan dan partisipasinya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

Chairani Asmi

NIM. 52154085

LEMBAR KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur :
4. Nama SKPD :
5. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2
 S3
6. Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen
 Pertanian MIPA
 Lain-lain (.....)
7. Lama Bekerja : 1-5th 5-10th 10th

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberi tanda (X atau √) sesuai pendapat dari Bapak/Ibu pada tabel yang sudah tersedia (satu jawaban dalam setiap nomor pernyataan)

Pilihan jawaban :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

B. DAFTAR PERNYATAAN

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010.					
2.	Saya tidak lagi mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku sekarang ini					
3.	Saya memiliki analisa yang baik atas laporan operasional, neraca, LRA, laporan perubahan SAL, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK.					
4.	Saya paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya laporan keuangan instansi sesuai SAP 2010.					
5.	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggarannya.					
6.	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.					

2. Pendidikan

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dalam menyusun LKPD.					
2.	SKPD mengharuskan saya untuk memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan.					
3.	Saya memiliki pengetahuan tentang pelayanan yang baik dalam bidang pekerjaan saya.					

4.	Kemampuan saya dalam menganalisis pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan lanjutan.					
5.	Saya memiliki keahlian seperti yang dibutuhkan SKPD.					
6.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaan saya.					

3. Pelatihan

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan bekerja di bidang akuntansi.					
2.	Saya memahami materi pelatihan yang diberikan.					
3.	Pelatihan yang diberikan SKPD untuk meningkatkan pengetahuan, <i>skill</i> , dan kemampuan yang saya miliki.					
4.	Pelatihan yang diberikan SKPD adalah untuk mencapai tujuan SKPD.					
5.	Pelatihan yang diberikan memudahkan Saya dalam menyusun LKPD.					
6.	Setelah Mengikuti Pendidikan Dan pelatihan Keuangan, Pelayanan Dari Pegawai SKPD Meningkat.					

4. Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

No	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	SS
1.	Saya berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan.					
2.	Laporan keuangan yang saya sajikan berkua litas dan memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.					
3.	Laporan keuangan yang saya sajikan/susun dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya.					
4.	Laporan keuangan yang saya sajikan/susun sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD.					
5.	Laporan keuangan memiliki manfaat, lengkap. yang tepat saya sajikan waktu dan					
6.	Laporan keuangan yang saya sajikan disusun secara jujur ,dapat diverifikasi dan netral.					

Lampiran 2

DATA KUISIONER

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemahaman SAP (X1)						
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total X1
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
4	3	4	5	5	5	26
4	4	4	3	4	4	23
5	5	5	5	4	4	28
4	4	5	5	4	4	26
4	4	4	5	4	3	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	3	3	19
3	3	3	4	3	3	19
3	3	3	4	3	3	19
3	3	3	4	3	3	19
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	3	24
4	4	5	5	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	4	5	29
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	5	5	4	26
4	4	4	4	3	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	4	3	20
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	4	5	29
3	4	5	4	4	4	24

4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	4	4	5	27
4	5	5	4	4	5	27
4	5	5	4	4	5	27
4	5	5	4	4	5	27
4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	3	4	3	22
4	4	4	4	4	5	25
3	4	3	4	3	3	20
4	4	5	4	4	4	25
5	4	3	4	4	5	25
4	4	5	4	4	4	25
5	4	5	4	4	4	26
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24

2. Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan (X2)						
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total X2
4	5	2	3	4	5	23
4	4	4	3	4	5	24
5	1	4	5	4	5	24
5	4	4	3	4	5	25
5	4	4	4	4	5	26
5	5	4	4	4	5	27
4	2	2	3	3	4	18
5	4	4	4	4	5	26
5	4	4	4	4	5	26
4	2	3	4	4	3	20
4	4	4	4	5	4	25
5	5	5	5	5	4	29
5	3	5	5	5	4	27
3	4	2	4	4	4	21
5	5	4	5	5	5	29
5	4	5	5	4	5	28
4	5	5	5	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
5	3	3	3	4	5	23
4	5	5	5	5	5	29
3	4	4	4	4	4	23
3	2	4	4	4	3	20
4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	4	5	5	27
5	4	4	5	5	5	28
4	2	2	2	2	4	16
5	2	2	2	2	5	18
3	4	4	4	5	4	24
5	3	3	3	3	5	22
5	4	4	4	4	5	26
5	4	4	3	5	5	26
3	3	4	4	4	3	21
5	4	4	3	4	5	25
5	4	4	4	5	2	24
3	4	4	3	4	4	22
4	4	4	3	5	4	24

4	4	4	4	4	5	25
5	4	4	4	4	5	26
5	5	3	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	3	3	4	20
3	4	4	4	3	3	21
2	2	2	2	2	3	13
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	4	26
4	4	2	3	3	3	19
4	3	3	4	4	3	21
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	29
4	3	3	4	4	3	21
2	4	4	3	4	4	21
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	4	4	27
5	5	4	5	5	5	29
3	4	4	4	3	3	21
4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	5	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	4	5	27
2	4	3	5	4	5	23
4	4	4	4	4	5	25
3	5	5	5	4	4	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
3	3	3	4	4	4	21
2	4	2	4	4	4	20
3	5	4	4	5	5	26
4	5	4	4	4	5	26
3	4	3	4	4	3	21
4	4	4	3	4	4	23
3	4	3	4	4	3	21
4	4	4	4	4	4	24
3	3	2	4	4	3	19
2	5	1	4	4	3	19
5	5	4	4	4	4	26

4	4	4	4	4	4	24
3	5	4	5	3	5	25
5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	4	5	3	27
5	5	4	5	5	3	27
5	5	4	4	5	3	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	5	3	26
5	5	4	4	4	4	26
4	5	4	4	4	3	24
4	3	4	5	5	4	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	4	5	28
4	2	4	5	4	3	22
4	2	4	4	5	4	23
5	4	5	5	5	5	29
4	5	5	5	5	4	28
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	3	4	4	21
3	3	3	3	5	5	22
3	3	3	3	3	4	19
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18

3. Pelatihan

Pelatihan (X3)						
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total X3
5	5	5	3	4	5	27
5	3	5	4	5	4	26
5	4	5	5	5	4	28
5	3	4	4	4	5	25
5	4	5	5	5	5	29
5	4	5	5	5	5	29
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	5	5	5	27
5	4	5	4	5	4	27
5	4	4	4	3	4	24
4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	4	25
5	3	4	5	4	4	25
3	5	3	3	4	3	21
4	5	5	4	5	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	3	4	4	4	4	23
5	4	5	5	5	4	28
5	4	5	5	5	5	29
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	3	4	3	22
5	5	5	4	5	5	29
4	4	5	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	3	4	4	25
4	5	5	5	5	5	29
3	3	5	5	5	5	26
5	5	5	5	5	4	29
5	2	4	4	3	3	21
3	4	4	5	4	5	25
4	4	5	5	5	5	28
3	5	3	3	4	3	21
3	3	3	4	4	4	21

5	5	5	4	4	5	28
5	4	5	5	5	5	29
5	3	5	5	5	5	28
5	4	4	5	4	5	27
4	5	4	4	3	3	23
5	5	4	5	4	4	27
4	4	4	4	5	3	24
4	5	5	5	4	4	27
5	5	5	5	4	4	28
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	4	5	4	28
4	5	4	4	5	4	26
5	5	4	5	5	4	28
5	4	4	4	4	5	26
5	4	4	4	3	4	24
4	4	4	4	4	3	23
4	4	5	5	5	5	28
4	5	4	4	4	5	26
5	5	5	5	4	5	29
4	4	4	4	4	3	23
4	5	4	5	5	4	27
5	5	5	5	4	4	28
5	4	4	4	5	5	27
5	4	4	4	5	4	26
4	2	3	4	5	4	22
5	5	5	5	5	4	29
5	5	4	5	5	4	28
5	5	4	5	5	5	29
5	4	5	5	5	5	29
5	4	4	5	4	3	25
5	5	5	5	5	2	27
5	4	4	5	5	2	25
5	4	4	4	4	2	23
5	4	4	4	2	3	22
3	4	5	5	3	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	5	4	27
2	4	5	4	4	2	21
2	4	4	5	4	2	21
4	5	5	5	4	5	28

5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	5	5	27
4	5	5	3	5	4	26
4	5	5	3	5	4	26
4	5	5	3	5	4	26
4	5	5	3	5	4	26
4	4	4	4	3	4	23
4	4	3	4	4	3	22
4	4	4	4	3	3	22
3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	3	22
3	4	4	5	4	4	24
3	4	3	5	3	3	21
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	4	4	4	25
4	4	5	5	5	5	28
4	4	5	5	5	5	28
5	5	4	4	4	3	25
3	3	3	4	5	5	23
4	4	3	4	4	5	24
4	4	3	3	4	5	23
4	4	4	4	5	4	25

4. Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan

Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan (Y)						
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y
5	4	5	4	4	4	26
5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	4	4	5	25
5	5	4	4	4	5	27
4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	4	3	3	22
4	4	5	4	4	5	26
4	4	5	4	4	4	25
4	5	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	3	4	3	21
4	4	3	3	4	3	21
5	5	3	3	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
5	4	5	3	4	5	26
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	2	4	4	4	22
5	5	5	4	5	4	28
5	4	5	5	5	5	29
5	4	5	5	5	4	28
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	3	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	2	4	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
4	4	2	4	4	4	22
4	4	2	4	4	4	22
5	5	5	4	5	4	28
5	4	5	5	5	5	29
5	4	5	4	4	4	26
5	4	5	5	5	4	28
4	4	4	4	3	4	23
4	4	5	4	4	4	25

4	5	5	5	4	5	28
5	4	4	4	3	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	3	4	3	21
4	4	3	3	4	3	21
4	4	5	4	4	4	25
5	5	3	3	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	3	4	4	24
5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	4	4	5	25
5	5	4	4	4	5	27
4	5	4	5	4	4	26
3	3	3	3	3	4	19
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	4	25
4	4	3	3	4	3	21
3	3	3	4	4	3	20
3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	3	4	3	21
5	5	4	5	5	4	28
5	5	4	4	4	4	26
5	5	4	5	5	4	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24

4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	4	5	5	26
5	4	5	5	4	4	27
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	5	26
5	5	5	5	5	4	29
5	5	4	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
4	4	5	5	5	3	26
5	5	5	5	3	3	26
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	3	5	4	22
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	25
4	4	3	3	4	4	22
4	4	3	3	4	4	22
5	5	5	5	5	5	30

Lampiran 3

HASIL OLAH DATA SPSS

1. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pemahaman Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,900	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pemahaman SAP1	19,79	5,663	,729	,577	,882
Pemahaman SAP2	19,79	5,339	,810	,757	,869
Pemahaman SAP3	19,72	4,951	,811	,718	,869
Pemahaman SAP4	19,61	5,957	,573	,404	,904
Pemahaman SAP5	19,82	5,785	,700	,559	,887
Pemahaman SAP6	19,82	5,301	,759	,629	,877

2. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Latar Belakang Pendidikan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Latar Belakang Pendidikan1	20,33	9,435	,489	,320	,782
Latar Belakang Pendidikan2	20,39	9,048	,536	,326	,771
Latar Belakang Pendidikan3	20,54	8,514	,699	,526	,728
Latar Belakang Pendidikan4	20,34	9,479	,597	,488	,756
Latar Belakang Pendidikan5	20,23	9,532	,658	,493	,746
Latar Belakang Pendidikan6	20,22	10,497	,366	,187	,805

3. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pelatihan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,648	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pelatihan1	21,42	4,953	,350	,144	,616
Pelatihan2	21,51	5,566	,191	,116	,669
Pelatihan3	21,41	4,648	,577	,350	,537
Pelatihan4	21,43	5,197	,333	,166	,621
Pelatihan5	21,41	4,810	,456	,254	,577
Pelatihan6	21,67	4,547	,399	,213	,599

4. Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Ketepatan waktu penyusunan

Laporan keuangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,791	24

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan1	20,38	6,036	,691	,588	,810
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan2	20,46	6,231	,680	,595	,814
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan3	20,59	5,840	,586	,425	,834
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan4	20,54	5,786	,689	,519	,810
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan5	20,50	6,636	,561	,319	,835
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan6	20,53	6,252	,595	,375	,828

Correlations

		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan1	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan2	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan3	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan4	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan5	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan6	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 100	,710 100	,503 100	,479 100	,425 100	,514 100	,795 100
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,710 100	1 100	,383 100	,575 100	,419 100	,512 100	,780 100
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,503 100	,383 100	1 100	,575 100	,426 100	,373 100	,743 100
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,479 100	,575 100	,575 100	1 100	,479 100	,491 100	,803 100
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,425 100	,419 100	,426 100	,479 100	1 100	,432 100	,685 100
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,514 100	,512 100	,373 100	,491 100	,432 100	1 100	,727 100
Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,795 100	,780 100	,743 100	,803 100	,685 100	,727 100	1 100

1. Distribusi Frekuensi dan Persentase Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pernyataan												
P1	10	10%	72	72%	18	18%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P2	12	12%	68	68%	20	20%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P3	21	21%	57	57%	22	22%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P4	20	20%	70	70%	10	10%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P5	8	8%	73	73%	19	19%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P6	13	13%	63	63%	24	24%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%

2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Latar Belakang Pendidikan

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pernyataan												
P1	41	41%	31	31%	23	23%	5	5%	0	0.0%	100	100%
P2	35	35%	42	42%	14	14%	8	8%	1	1%	100	100%
P3	23	23%	52	52%	15	15%	9	9%	1	1%	100	100%
P4	32	32%	46	46%	19	19%	3	3%	0	0.0%	100	100%
P5	34	34%	53	53%	10	10%	3	3%	0	0.0%	100	100%
P6	42	42%	36	36%	21	21%	1	1%	0	0.0%	100	100%

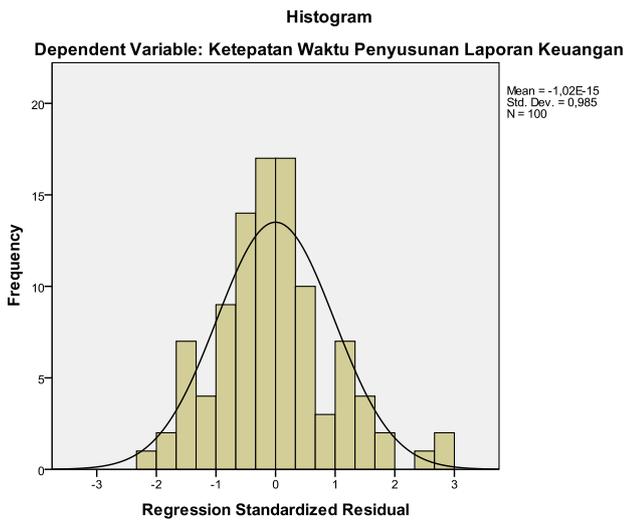
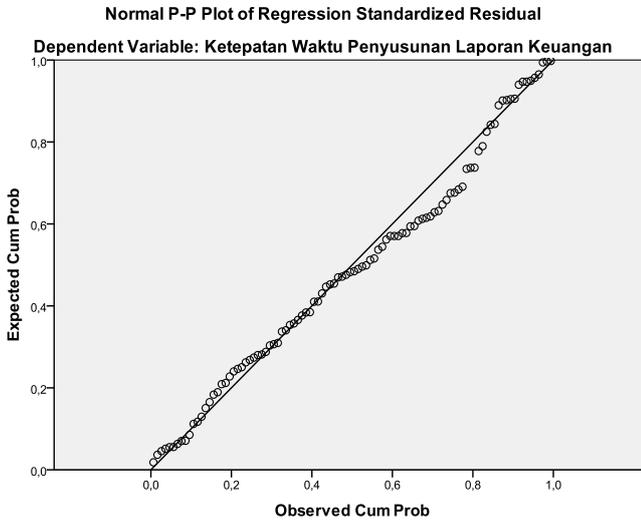
3. Distribusi Frekuensi dan Persentase Pelatihan

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	49	49%	39	39%	10	10%	2	2%	0	0.0%	100	100%
P2	38	38%	52	52%	8	8%	2	2%	0	0.0%	100	100%
P3	45	45%	46	46%	9	9%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P4	45	45%	44	44%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P5	47	47%	43	43%	9	9%	1	1%	0	0.0%	100	100%
P6	35	35%	45	45%	15	15%	5	5%	0	0.0%	100	100%

4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

Tanggapan Responden	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Netral (N)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	23	23%	56	56%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P2	25	25%	64	64%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P3	25	25%	55	55%	16	16%	4	4%	0	0.0%	100	100%
P4	27	27%	44	44%	21	21%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P5	21	21%	68	68%	11	11%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%
P6	24	24%	59	59%	17	17%	0	0.0%	0	0.0%	100	100%

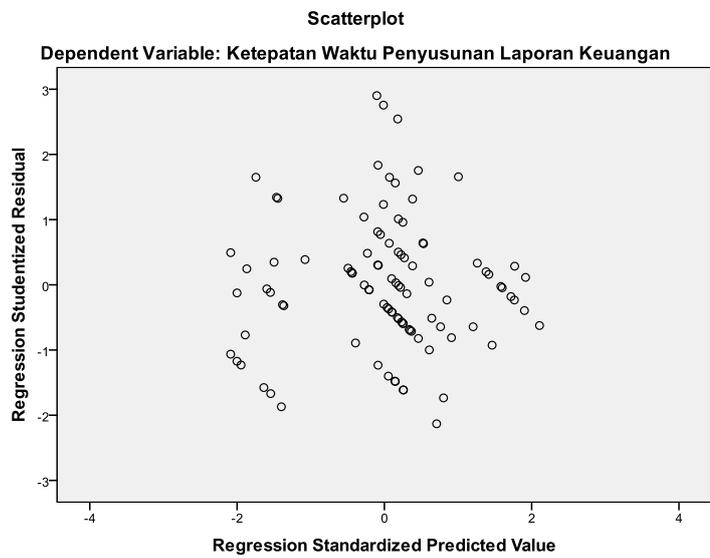
1. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,95281196
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,865
Asymp. Sig. (2-tailed)		,443

2. Uji Heteroskedastisitas



3. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman SAP	,980	1,020
	Latar Belakang Pendidikan	,805	1,243
	Pelatihan	,794	1,260

1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,897	2,879		3,090	,003
	Pemahaman SAP	,755	,072	,719	10,453	,000
	Latar Belakang Pendidikan	,090	,062	,110	1,456	,149
	Pelatihan	-,170	,087	-,150	-1,967	,052

1. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,745 ^a	,555	,541

2. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470,466	3	156,822	39,877	,000 ^a
	Residual	377,534	96	3,933		
	Total	848,000	99			

3. Uji Parsial (ujit)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,897	2,879		3,090	,003
	Pemahaman SAP	,755	,072	,719	10,453	,000
	Latar Belakang Pendidikan	,090	,062	,110	1,456	,149
	Pelatihan	-,170	,087	-,150	-1,967	,052

1. R TABEL

Tabel R Product Moment Pada Sig. 0,05 (Two Tail)

N	r	N	R	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

2. F Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penye- but	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.8	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.8	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.8	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.8	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.8	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.8	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.8	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.8	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.8	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.8	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.8	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.8	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.8	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.8	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.8	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.8	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.8	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.8	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.8	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.8	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.8	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.8	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.8	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.8	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.8	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.8	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.8	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.8	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.77	1.75

122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.8	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.8	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.8	1.77	1.75

3. T TABEL

Pr Dnh /f	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262

116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013



CHAIRANI ASMI, S.Akun

Education

- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2015-2020)
- SMK Swasta BM Apipsu Medan (2012-2015)
- SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan (2009-2012)
- SD Negeri 104204 (2003-2009)



JL. Rahayu Dsn VIII
Cempaka
Medan, Indonesia



081286890824



xx24nandha@gmail.co
m

Informasi Lainnya

Keterampilan

- MS. Office

Tanggal Lahir

- 24/Aug/1997

Bahasa

- Indonesia
- English

